

# Prototype Layanan Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Akomodasi Pariwisata Menggunakan *Service Oriented Enterprise Architecture Framework*

Desak Putu Juniati, Lukito Edi Nugroho, Eko Nugroho

Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia  
e-mail: desakjuni.cio.8a@mail.ugm.ac.id

**Intisari**— Selama ini, orang membicarakan perizinan hanya sebatas pada penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Disisi lain, masih ada aspek riil yang belum tertangani dengan baik yaitu bagaimana menyajikan informasi agar mampu memenuhi kebutuhan pemohon izin terkait kepastian lahan yang akan digunakan untuk usaha sesuai dengan rencana tata ruang suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat *prototype* layanan izin pemanfaatan ruang untuk akomodasi pariwisata pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem. *Prototype* ini terdiri atas dua layanan utama yaitu layanan *front office* dan *back office*. Layanan *front office* pada *prototype* ini akan menampilkan data spasial dan data atribut terkait informasi kepemilikan lahan (pengecekan sertifikat tanah) dan informasi blok peruntukan lahan dengan melakukan integrasi dengan Kantor Pertanahan dan Bappeda Kabupaten Karangasem. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Service Oriented Enterprise Architecture Framework* (SOEAF) yang mengintegrasikan model *Service Oriented Architecture* (SOA) kedalam kerangka *Enterprise Architecture* menggunakan perluasan kerangka kerja Zachman dengan menambahkan kolom baru bernama kolom layanan yang meliputi level kontekstual, konseptual, logikal dan fisik. Penelitian ini menghasilkan *prototype* layanan IPR untuk akomodasi pariwisata yang memiliki interoperabilitas data sehingga mampu memberikan kepastian lahan kepada pemohon izin.

**Kata Kunci**— Izin Pemanfaatan Ruang, *Service Oriented Enterprise Architecture Framework*.

## I. PENDAHULUAN

Beberapa daerah penyelenggara pelayanan perizinan telah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui layanan *website*. Secara umum, informasi yang disajikan sudah bisa memenuhi kebutuhan pemohon izin, khususnya untuk permohonan izin usaha yang tidak memerlukan adanya persyaratan izin pemanfaatan ruang (IPR) sebagai proses awal dalam pengurusan izin usaha, seperti permohonan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP). Akan tetapi, untuk permohonan izin usaha yang membutuhkan adanya IPR sebagai salah satu persyaratan, informasi yang disajikan belum bisa mengakomodasi kebutuhan utama pemohon izin.

Selama ini, orang membicarakan perizinan hanya sebatas pada penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yaitu bagaimana memadukan beberapa jenis pelayanan

perizinan menjadi satu pintu. Disisi lain, masih ada aspek riil yang belum tertangani dengan baik yaitu bagaimana menyajikan informasi agar mampu memenuhi kebutuhan pemohon izin terkait kepastian lahan yang akan digunakan untuk usaha sesuai dengan rencana tata ruang suatu wilayah.

Penyajian informasi tentang rencana tata ruang yang belum terakomodasi dengan baik akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan iklim usaha dan investasi pada suatu daerah. Hal ini karena para pengusaha/investor tidak memiliki gambaran yang jelas tentang rencana tata ruang pada daerah yang akan menjadi target investasi. Mereka harus datang langsung ke Dinas/Badan terkait hanya untuk memastikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk usaha masuk dalam fungsi kawasan sebagaimana yang termuat dalam rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah pada daerah tersebut.

Penelitian tentang pelayanan perizinan sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu Huda [1] melakukan penelitian untuk merancang ulang *prototype* sistem informasi perizinan berbasis *web* yang sesuai kebutuhan para *stakeholder* pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek menggunakan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan *waterfall model*. Penelitian lain tentang pelayanan perizinan dilakukan oleh Achmad [2] yaitu melakukan penelitian untuk membuat cetak biru sistem informasi pelayanan terpadu di Pemerintah Kota Pekalongan dengan menggunakan kerangka kerja rekayasa *web*. Penelitian ini memiliki objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga hasil penelitian dimungkinkan akan berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak membahas pembuatan *prototype* terintegrasi dengan instansi yang terkait dengan bidang perizinan, sedangkan penelitian ini lebih ditekankan pada proses integrasi dengan instansi yang terkait dengan bidang pemanfaatan ruang.

Saat ini, proses pelayanan perizinan pada KPPT Kabupaten Karangasem menggunakan sebuah aplikasi berbasis Microsoft Access yang hanya menangani pencetakan izin dan laporan penerbitan izin. Informasi tentang rencana tata ruang yang merupakan pondasi dalam pengurusan izin masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan banyak kendala dalam proses pelayanan perizinan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat maka perlu dibangun layanan yang mampu mempercepat proses pelayanan perizinan dan dapat memberikan kepastian lahan kepada pemohon izin.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan *prototype* layanan IPR untuk akomodasi pariwisata pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Karangasem yang terintegrasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karangasem sehingga mampu menyajikan informasi tentang data spasial dan data atribut terkait informasi rencana detail tata ruang pada kawasan efektif pariwisata Kabupaten Karangasem.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian pelayanan perizinan sebelumnya sudah pernah dilakukan yaitu merancang ulang *prototype* sistem informasi perizinan berbasis *web* pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis kegagalan penerapan sistem informasi dan hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk merancang ulang *prototype* sistem informasi perizinan yang sesuai dengan kebutuhan para *stakeholder*[1]. Dalam penelitian tersebut belum ada integrasi data dengan aplikasi atau basis data lainnya.

Penerapan SOA dalam kerangka kerja Zachman sebelumnya pernah diteliti untuk memahami pandangan yang berbeda tentang SOA, SOA diposisikan pada sembilan sel dalam kerangka kerja Zachman[3]. Selain itu, ada penelitian yang menggunakan kerangka kerja Zachman untuk memperjelas perbedaan antara SOA dan *Software as a Service* (SaaS), SOA dimasukkan pada kolom jaringan pada kerangka kerja Zachman[4].

Menurut Khoshnevis *et al*[5], model integrasi[3] dan [4] tidak sesuai dengan aturan dalam kerangka kerja Zachman yang menyatakan bahwa setiap baris mewakili perspektif tertentu dan setiap kolom merupakan abstraksi tertentu dari suatu *enterprise*, dengan demikian setiap sel merupakan abstraksi yang unik dari perspektif yang unik. Oleh karena itu, tidak bisa mewakili model layanan dalam sel dari kolom yang tidak dimaksudkan untuk mewakili fungsi. Penelitian Khoshnevis *et al*[5] mengajukan sebuah metode baru yang mengintegrasikan model *Service Oriented Architecture* (SOA) ke dalam kerangka *Enterprise Architecture* menggunakan perluasan kerangka kerja Zachman dengan menambahkan kolom baru bernama "kolom layanan".

### B. Landasan Teori

#### 1. Kerangka Kerja Zachman

Kerangka kerja Zachman pertama kali dipublikasikan dalam Zachman[6]. Awalnya berupa struktur matrik enam baris tiga kolom. Kerangka kerja ini kemudian diperluas dan diformulasikan oleh Sowa dan Zachman[7], perluasan ini berupa penambahan tiga kolom yakni kolom orang, waktu dan motivasi.

Kerangka kerja Zachman bukan sebuah metodologi karena kerangka kerja ini tidak menyebutkan metode dan proses spesifik untuk mengumpulkan, mengelola dan menggunakan informasi. Kerangka kerja Zachman lebih tepat digunakan sebagai sebuah alat untuk melakukan taksonomi pada

pengelolaan artefak arsitektur (dokumen perancangan, spesifikasi dan model) yang mampu menunjukkan siapa target artefak tersebut (misalnya pemilik bisnis, pengembang, dan lain-lain). Artefak merupakan komponen atau elemen organisasi yang berupa daftar definisi, yang dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan sistem informasi.

#### 2. *Service Oriented Architecture*

SOA merupakan sebuah bentuk arsitektur teknologi yang mengikuti prinsip-prinsip *service-orientation*[8]. Konsep *service-orientation* ini melakukan pendekatan dengan membagi fungsionalitas yang besar menjadi sekumpulan layanan kecil yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. SOA tidak terkait dengan suatu teknologi tertentu, namun cenderung ke arah pendekatan untuk pembangunan perangkat lunak yang modular.

SOA adalah arsitektur perangkat lunak yang fungsionalitasnya dikelompokkan sebagai proses bisnis dan dikemas sebagai *interoperable service* (dapat digunakan lintas *platform*). SOA juga mendeskripsikan bagaimana infrastruktur teknologi informasi dapat membantu aplikasi-aplikasi yang berbeda saling bertukar data sehingga mendukung suatu proses bisnis yang diinginkan [9].

*Service* dalam lingkup SOA merupakan kumpulan fungsi, prosedur yang akan merespon jika diminta oleh *client*. Dalam arsitektur SOA, suatu aplikasi dimodelkan sebagai urutan dari sekumpulan *service* melalui suatu komponen. Lokasi keberadaan komponen tersebut dapat ditemukan oleh *client* secara dinamis. Dalam arti tidak dinyatakan secara statis dan menggunakan mekanisme *discovery* (pencarian) untuk mencari keberadaan komponen tersebut. Selain itu, *client* dapat meminta (*invoke*) *service* tersebut secara dinamis. Lebih jauh lagi, *service* dapat dipandang sebagai enkapsulasi logik dari satu atau sekumpulan aktivitas tertentu.

Banyak teknologi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan arsitektur SOA, diantaranya adalah CORBA, DCOM, RMI dan *Web Service*. Teknologi-teknologi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk CORBA, DCOM dan RMI bersifat sistem tertutup (*proprietary*) sehingga pembangunan hanya dalam ruang lingkup dan kalangan tertentu. Sedangkan untuk *web service* bersifat sistem terbuka (*non-proprietary*) berbasis *web*. *Web service* menyediakan cara standar untuk aplikasi agar dapat mengekspos fungsionalitasnya melalui *web* atau berkomunikasi dengan aplikasi lain melalui jaringan tanpa perlu melihat implementasi aplikasi, bahasa pemrograman ataupun *platform* komputer[8]. Untuk itu, implementasi SOA pada penelitian ini menggunakan teknologi *web service*.

#### 3. *Service Oriented Enterprise Architecture Framework*

Kombinasi *service oriented architecture* dan arsitektur *enterprise*, memperkenalkan gagasan tentang *Service Oriented Enterprise Architecture* (SOEA) dengan memperhatikan hubungan sinergis antara keduanya. Pendekatan ini memungkinkan *service oriented architecture* dan arsitektur *enterprise* dapat saling melengkapi untuk dukungan yang lebih baik terhadap kebutuhan bisnis organisasi[10]. SOEA dimaksudkan sebagai disiplin dan pedoman untuk mendapatkan

keuntungan dari penggunaan *service oriented architecture* dan arsitektur *enterprise* secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Gbr. 1 memperlihatkan hubungan antara *service oriented architecture* dan arsitektur *enterprise*.



Gbr. 1 *Service Oriented Enterprise Architecture*[11]

Gbr. 1 merupakan representasi grafik tentang bagaimana melihat hubungan *service oriented architecture* dan arsitektur *enterprise*. Arsitektur *enterprise* akan memberikan gambaran besar dan *service oriented architecture* dapat dilihat sebagai *Plug-In* untuk arsitektur *enterprise*. Hasilnya akan memberikan integrasi yang kuat antar bisnis dan teknologi informasi melalui apa yang disebut dengan SOEA[11]. Dalam beberapa literatur SOEA hanya menyebutkan kontribusi *service oriented architecture* pada arsitektur *enterprise* dan sebaliknya, sedangkan untuk penggunaan kerangka kerja dalam menentukan struktur global SOEA dikenal dengan istilah *service oriented enterprise architecture framework* (SOEAF)[12].

SOA tidak akan berhasil diluar pengembangan arsitektur *enterprise*[13] karena arsitektur *enterprise* dan *service oriented architecture* memiliki ketergantungan satu sama lain. Disatisi, *service oriented architecture* memberikan prinsip-prinsip dan pedoman penting disisi aplikasi arsitektur *enterprise*. Disisi lain, untuk bisa berhasil, *service oriented architecture* bergantung pada aspek proses, informasi dan aplikasi dari arsitektur *enterprise*[14]. Jadi arsitektur *enterprise* merupakan sebuah kerangka kerjayang mencakup semua dimensi arsitektur teknologi informasi untuk suatu organisasi dan *service oriented architecture* menyediakan strategi arsitektur yang menggunakan konsep "service" untuk mencapai keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi.

Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini merupakan kerangka kerja hasil perluasan dari kerangka kerja Zachman yaitu dengan menambahkan kolom baru bernama "kolom layanan", dimana setiap sel adalah arsitektur berorientasi layanan dari baris yang bersangkutan[5]. Gbr. 2 menunjukkan kerangka kerja *Service Oriented Enterprise Architecture* (SOEA).

SOEAF	Zachman Framework Primary Columns						Service Column
	What	How	Where	When	Who	Why	
Planner (Contractual)	..	..	..	..	..	..	List of Business Services
Owner (Conceptual)	..	..	..	..	..	..	Business Service Model
Designer (Logical)	..	..	..	..	..	..	Logical System Service Model
Builder (Physical)	..	..	..	..	..	..	Physical System Service Model
Subcontractor (As-Built)	..	..	..	..	..	..	Services Implementation
Functioning Enterprise	..	..	..	..	..	..	Functioning Service Oriented Enterprise

Gbr. 2 *Service Oriented Enterprise Architecture Framework*[5]

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian dimulai dengan melakukan identifikasi masalah terhadap objek yang diteliti melalui studi literatur. Dilanjutkan dengan analisis, yaitu menelaah lebih lanjut hasil identifikasi masalah melalui identifikasi proses bisnis untuk melakukan

pencarian tentang apa yang diharapkan dan yang dibutuhkan masyarakat terhadap KPPT Kabupaten Karangasem. Hasil identifikasi proses bisnis digunakan sebagai dasar untuk analisis kesenjangan antara kondisi layanan izin pemanfaatan ruang saat ini dan kondisi yang ingin dicapai sehingga didapatkan solusi yang paling sesuai dengan kondisi KPPT Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini, metode untuk membuat *prototype* layanan izin pemanfaatan ruang untuk akomodasi pariwisata menggunakan perluasan kerangka kerja Zachman dengan *Service Oriented Architecture* (SOA) yang disebut dengan *Service Oriented Enterprise Architecture Framework* (SOEAF), meliputi rancangan kontekstual, konseptual, logikal dan fisik. Setelah *prototype* dirancang dan diimplementasikan selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan pendekatan *black box testing* yang fokus pada domain informasi, terutama pada fungsi perangkat lunak, apakah input dan output telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Identifikasi Proses Bisnis

Layanan izin yang ada saat ini pada KPPT Kabupaten Karangasem mengharuskan pemohon izin datang langsung ke KPPT Kabupaten Karangasem untuk mencari informasi tentang mekanisme dan persyaratan permohonan izin usaha. Pemohon izin juga harus datang langsung ke Bappeda Kabupaten Karangasem untuk mencari informasi tentang rencana pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa lahan yang akan dimohonkan izin masuk dalam rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem. Hal ini harus dilakukan karena rendahnya interoperabilitas data/informasi sehingga tidak terjadi pertukaran data/informasi pada masing-masing instansi terkait.

Implementasi SOA dengan menggunakan *web service* diharapkan mampu meningkatkan interoperabilitas data/informasi sehingga terjadi pertukaran data/informasi antara KPPT Kabupaten Karangasem yang menangani masalah izin pemanfaatan ruang untuk akomodasi pariwisata dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem terkait data kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk melakukan pengecekan nomor sertifikat tanah yang diinputkan oleh user dan Bappeda Kabupaten Karangasem yang menyediakan data untuk melakukan pengecekan blok peruntukan lahan dari nomor sertifikat tanah tersebut. Layanan yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat melalui layanan izin pemanfaatan ruang untuk akomodasi pariwisata adalah layanan pencarian informasi lahan dan pendaftaran IPR untuk akomodasi pariwisata.

#### B. Analisis

Layanan izin pemanfaatan ruang pada KPPT Kabupaten Karangasem saat ini menggunakan aplikasi berbasis Microsoft Access yang hanya menangani pencetakan IPR dan laporan penerbitan IPR. Masing-masing izin pada KPPT Kabupaten Karangasem memiliki aplikasi dan basis data sendiri serta tidak ada relasi diantara basis data tersebut.





Gbr. 6 User interface Kantor Pertanahan

Bappeda membangun layanan getPeruntukan yang membutuhkan input titik koordinat sertifikat tanah serta menghasilkan informasi berupa kawasan efektif pariwisata, blok, peruntukan lahan, penanganan lahan, luas lahan, lokasi lahan yang terdiri atas nama desa dan kecamatan dalam format XML. KPPT Kabupaten Karangasem dapat mengkases layanan Bappeda dengan mengakses *user interface* seperti tampak pada Gbr. 7.



Gbr. 7 User interface Bappeda

**D. Pembuatan Prototype**

Pembuatan *prototype* adalah tahapan membangun antar muka (*interface*) antara masyarakat dengan KPPT Kabupaten Karangasem yang diimplementasikan dalam bentuk *website*.

Komponen-komponen untuk membuat *prototype* layanan IPR untuk akomodasi pariwisata yang terintegrasi dengan layanan informasi pertanahan dan layanan informasi rencana tata ruang adalah sebagai berikut.

- Basis data layanan IPR untuk akomodasi pariwisata, layanan informasi pertanahan dan layanan informasi rencana tata ruang menggunakan MySQL.
- *Web service* layanan informasi pertanahan dan *web service* layanan informasi rencana tata ruang menggunakan toolkit NuSOAP.
- Aplikasi layanan informasi pertanahan dan layanan informasi rencana tata ruang menggunakan Google Maps API dengan *framework* CodeIgniter dan bahasa pemrograman PHP.
- Aplikasi layanan IPR untuk akomodasi pariwisata menggunakan *framework* CodeIgniter dengan bahasa pemrograman PHP.

Berikut adalah tampilan *website* layanan IPR untuk akomodasi pariwisata yang dibuat berdasarkan hasil rancangan *prototype* diatas.



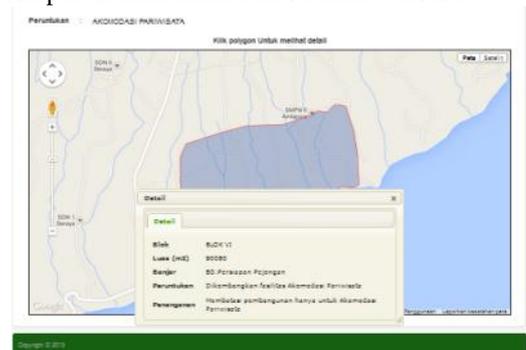
Gbr.8 Hasil pencarian kepemilikan lahan

Gbr. 8 merupakan tampilan untuk hasil pencarian kepemilikan lahan dari nomor sertifikat tanah yang diinputkan oleh *user*. Data yang ditampilkan pada Gbr. 8 merupakan data hasil integrasi dengan layanan informasi pertanahan. Apabila kolom sertifikat pada Gbr. 8 di-klik maka muncul peta pada layanan informasi pertanahan yang menampilkan detail kepemilikan lahan dari sertifikat tersebut.



Gbr.9 Hasil pencarian blok peruntukan lahan

Gbr. 9 merupakan tampilan untuk hasil pencarian blok peruntukan lahan dari nomor sertifikat tanah yang diinputkan oleh *user*. Data yang ditampilkan pada Gbr. 9 merupakan data hasil integrasi dengan layanan informasi pertanahan dan layanan informasi rencana tata ruang. Apabila kolom blok pada Gbr. 9 di-klik maka muncul peta pada layanan informasi rencana tata ruang seperti pada Gbr. 10 yang menampilkan detail blok peruntukan lahan dari sertifikat tersebut.



Gbr. 10 Hasil pencarian informasi blok peruntukan lahan

Apabila blok peruntukan lahan dari nomor sertifikat tanah yang diinputkan oleh *user* masuk dalam blok kawasan akomodasi pariwisata, selanjutnya *user* dapat melakukan pendaftaran izin pemanfaatan ruang untuk akomodasi pariwisata secara *online*. Dengan melengkapi data pemohon izin dan data badan usaha, *user* akan mendapatkan bukti pendaftaran berupa blanko permohonan izin yang sudah terisi data pemohon izin dan nomor pendaftaran.

*Prototype* layanan izin pemanfaatan ruang untuk akomodasi pariwisata ini memberikan solusi terhadap keterbatasan informasi peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang dibutuhkan oleh pemohon izin untuk melakukan proses pendaftaran izin pemanfaatan ruang khususnya untuk akomodasi pariwisata.

#### E. Evaluasi

Evaluasi bertujuan menemukan *bug* atau kekurangan pada *prototype* layanan IPR untuk akomodasi pariwisata yang sudah dikembangkan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *black box testing* yang fokus pada domain informasi, terutama pada fungsi perangkat lunak, apakah input dan output telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada tahap ini, diuraikan skenario pengujian yang dilakukan pada layanan *front office*, yaitu pencarian informasi lahan. Tabel I berisi skenario yang telah disusun.

Tabel I  
Skenario pengujian

No	Skenario	Hasil yang diharapkan
1	Cek nomor sertifikat tanah	Dilakukan validasi nomor sertifikat tanah pada basis data layanan IPR untuk akomodasi pariwisata untuk pengecekan nomor sertifikat tanah yang sama dengan yang diinputkan <i>user</i> . Apabila nomor sertifikat sudah terdaftar maka muncul pesan "Maaf nomor sertifikat sudah terdaftar pada basis data kami". Apabila belum terdaftar maka dilakukan pengecekan pada basis data layanan informasi pertanahan, apabila nomor sertifikat yang diinputkan tidak terdaftar pada basis data pertanahan maka muncul pesan "Sertifikat tidak ditemukan". Apabila nomor sertifikat terdaftar pada basis data pertanahan maka dilanjutkan ke proses selanjutnya.
2	Cek blok peruntukan lahan	Dilakukan validasi titik koordinat dari nomor sertifikat tanah yang diinputkan <i>user</i> pada basis data layanan informasi rencana tata ruang. Apabila tidak masuk dalam blok akomodasi pariwisata maka muncul pesan "nomor sertifikat tidak masuk dalam blok akomodasi pariwisata". Apabila masuk kawasan akomodasi pariwisata maka dilanjutkan ke proses pendaftaran IPR.
3	Cek luas lahan yang dimohonkan	Dilakukan validasi luas lahan yang dimohonkan pada basis data layanan informasi pertanahan. Apabila luas lahan yang dimohonkan lebih besar dari luas lahan yang ada maka muncul pesan "Maaf luas lahan yang dimohonkan lebih besar dari luas lahan yang ada". Apabila luas lahan yang dimohonkan lebih kecil atau sama dengan luas lahan yang ada maka dilanjutkan ke proses selanjutnya.
4	Cek posisi tanah	Dilakukan validasi untuk permohonan dengan jumlah sertifikat tanah lebih dari satu. Apabila nomor sertifikat tanah yang diinputkan tidak berada pada posisi sebelah menyebel (minimal ada 1 titik koordinat yang sama) maka akan muncul pesan "Sertifikat tidak berada pada posisi sebelah menyebel dengan sertifikat yang diinputkan sebelumnya". Apabila berada pada posisi sebelah menyebel maka dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa *prototype* layanan IPR untuk akomodasi pariwisata sudah dapat memenuhi kebutuhan pemohon izin terkait informasi peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem.

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar identifikasi proses bisnis, analisis, rancangan dan pembuatan *prototype* serta evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan penelitian *prototype* layanan IPR untuk akomodasi pariwisata menggunakan perluasan kerangka kerja Zachman dengan *service oriented architecture* (SOA) dapat memenuhi kebutuhan KPPT Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat serta memberikan kepastian lahan dan transparansi dalam proses pelayanan perizinan.

*Prototype* layanan IPR untuk akomodasi perlu dikembangkan dengan melakukan integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data identitas pemohon izin serta Kantor Pajak terkait data nomor pokok wajib pajak sehingga validitas data permohonan yang diajukan oleh pemohon izin dapat dipertanggungjawabkan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat diselesaikan karena doa, dukungan, dan semangat yang diberikan oleh semua pihak.

#### REFERENSI

- [1] Huda, M., *Analisis dan Perancangan Ulang Sistem Informasi Perizinan Berbasis Web Pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) Kabupaten Trenggalek*. Tesis Tidak Terpublikasi, Jogjakarta: Magister Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada, 2012.
- [2] Achmad, K. A., *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Berbasis Web Services di Pemerintah Kota Pekalongan*. Tesis Tidak Terpublikasi, Yogyakarta: Magister Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada, 2008.
- [3] Bloomberg, J. (2006, June) ZapThink. [Online]. <http://www.zapthink.com/2006/06/15/soa-and-the-zachman-framework/>
- [4] Laplante, A., Zhang, J., and Voas, J., "What's in a Name? Distinguishing between SaaS and SOA," *IT Professional*, pp. 46-50, 2008.
- [5] Khoshnevis, S., Aliee, F. S., and Jamshidi, P., "Model Driven Approach to Service Oriented Enterprise Architecture," *IEEE Asia-Pacific Services Computing Conference*, 2009.
- [6] Zachman, J. A., "A Framework for Information Systems Architecture," *IBM Systems Journal*, vol. 26 No. 3, pp. 276 – 292, 1987.
- [7] Zachman, J. A. (2003) Zachman framework for Enterprise Architecture, Primer for Enterprise Engineering and Manufacturing.
- [8] Erl, T. (2005) Service Oriented Architecture-Concepts, Technology and Design.
- [9] Yoosnanto, A. T., "Arsitektur Informasi Perusahaan Dengan Pendekatan Service Oriented Architecture Studi Kasus Service Point PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang," *STEI ITB*, 2009.
- [10] Singh, I. et al. (2004) Designing Web Services with the J2EE(TM) 1.4 Platform.
- [11] Knippel R., *Service Oriented Enterprise Architecture*.: IT-University of Copenhagen, 2005.
- [12] HAKI M. K. and Forte M. W., "Service Oriented Enterprise Architecture Framework," *IEEE*, 2010.
- [13] Grigoriu A., "SOA, BPM, EA, and Service Oriented Enterprise Architecture," *BPTrends*, 2007.
- [14] Greefhorst D., "Service Oriented Enterprise Architecture," *Proceeding of second workshop on landelijk architectuur congres*, 2006.